**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Berakhirnya Perang Dingin[[1]](#footnote-2) memunculkan berbagai implikasi bagi perubahan tatanan sistem internasional. Satu yang paling mencolok diantaranya adalah AS muncul sebagai satu-satunya negara *superpower,*[[2]](#footnote-3)sehingga merasa perlu untuk mengelaborasikan kembali perannya di dunia pasca runtuhnya Uni Soviet.[[3]](#footnote-4)

Sebelumnya, selama Perang Dingin, keamanan internasional didominasi oleh konfrontasi ideologi yang militeristis dan terpolarisasi antar negara adidaya (AS & Uni Soviet). Konfrontasi ini membagi industri Utara ke Dunia Pertama (Barat) dan Dunia Kedua (Blok Soviet). Karena persaingan mereka intens, bahaya perang menjadi sangat nyata,[[4]](#footnote-5) dan masa itu juga menjadi identik dengan kondisi internasional yang sering diistilahkan dengan *high politics* atau politik tingkat tinggi yang militeristik. Penekanan politik militer atau militerisme ini dipancarkan ke pinggiran dengan menggunakan transfer senjata oleh kedua negara adidaya sebagai alat untuk mengeksploitasi permusuhan yang sudah ada di dalam Dunia Ketiga dan sebagai kendaraan untuk mengejar persaingan pengaruh mereka. Dunia Kedua telah hancur,[[5]](#footnote-6)maka praktis konfrontasi bersenjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet-pun tereduksir.

Meskipun Amerika Serikat keluar sebagai “pemenang”, hal ini tak lantas membuat tatanan internasional menjadi damai ataupun aman. Permasalahan isu keamanan tetap relevan untuk dikaji karena sejak awal abad ke-21 persoalan keamanan tetap tidak menurun namun justru mengemuka ketika menengok ketegangan politik yang terjadi di Timur Tengah, Semenanjung Korea dan krisis politik lain di belahan Asia dan Afrika menyoal kedaulatan, nuklir hingga aksi-aksi teror.

Era modern justru semakin menunjukan eskalasi konflik keamanan semakin menajam. Terlebih, dengan ekspansi pasar yang sangat cepat akibat globalisasi, tuntutan kebutuhan terhadap keamanan-pun semakin meningkat dan menjadi kekhawatiran negara-negara.

Di tengah kegelisahan mengkalkulasi ancaman dan tantangan keamanan, masyarakat dunia semakin dikejutkan dengan hadirnya fenomena pelibatan aktor-aktor di luar negara dalam melakukan aktivitas pengamanan maupun penanganan konflik. Hal tersebut sering dikaitkan dengan kemenangan kapitalisme Amerika Serikat. Perang tidak lagi menjadi monopoli negara dan kian menantang asumsi “klasik” tentang konflik dunia sekaligus pergeseran analisis tentang militer dan negara serta konsekuensinya atas sebuah konsep bernama kedaulatan. Ialah privatisasi peran militer berwujud *Private Military Company* yang telah menjadi strategi ekonomi politik internasional beberapa negara besar termasuk Amerika Serikat. Di Amerika Serikat privatisasi keamanan yang dikategorikan sebagai bisnis ini ditangani bersama antara Departemen Pertahanan yang sering dikenal dengan istilah Pentagon dan Departemen Luar Negeri AS.[[6]](#footnote-7)

Selama masa perang hingga Soviet runtuh, alokasi anggaran di bidang militer AS sebenarnya cukup memberatkan AS. Kendala politik partisan Amerika Serikat tidak memungkinkan bagi Gedung Putih dan Pentagon untuk terus menerus mempertahankan tingkat anggaran pertahanan yang tinggi. Kreasi kebijakan baru diperlukan, mulai dari keinginan untuk melaksanakan pembagian beban ekonomi pertahanan diantara anggota-anggota NATO, pengukuhan aliansi strategis di kawasan Asia Pasifik sampai dengan berbagai pengetatan di AS sendiri termasuk pengurangan jumlah tentara, restrukturisasi komando kewilayahan dan privatisasi sebagian tugas negara di bidang pertahanan. Dengan ini, konsep-konsep baru muncul, misalnya operasi militer selain perang (*military operation other than war*)untuk memberi justifikasi baru bagi peran militer, seperti halnya konsep tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) merupakan pijakan doktrinal untuk melakukan intervensi dalam hubungan antarnegara.

Pentagon atau Departemen Pertahanan AS tak mungkin bertahan tanpa Northop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing ataupun Halliburton. Mereka adalah pembayar pajak yang sebagiannya digunakan untuk memperkuat mesin perang AS, alat penting kaum militeris ekspansionis untuk memuasi hasrat penjajahan, untuk tujuan “globalisasi demokrasi”, maupun untuk berbagai bentuk kolonialisme modern. Sebaliknya industri militer itu dipastikan akan sulit bertahan ketika pesanan menyusut atau pengistilahan Eisenhower sebagai *Military Industrial Complex*. Karakter pasar senjata sebagai pasar monopsonis, dengan negara sebagai satu-satunya pembeli, memperkeruh suasana. Pilihan yang paling rasional bagi mereka mau tidak mau ialah melakukan diversifikasi usaha, termasuk dengan membentuk *private miilitary company*yang menyediakan jasa pengamanan, dan mendesak agenda pembangunan kekuatan militer kepada negara.

Ada tujuh juta militer melepas baju seragamnya setelah era perang dunia dan runtuhnya Uni Soviet. Jumlah tersebut masih belum dihitung bagi militer-militer yang “terdemobilisasi” karena perubahan politik. Banyak dari mereka yang kemudian mengadu nasib di sektor privat, termasuk dengan mendirikan atau menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan keamanan ataupun jasa kemiliteran, karena pada saat bersamaan banyak negara “*great powers”* engganuntuk melibatkan diri dalam upaya keamanan di wilayah-wilayah konflik. Dari situ, maka muncullah *gap* dalam *market of security* yang segera diisi oleh *Private Military Company*. Pada saat negara-negara tidak memiliki kapabilitas militer yang memadai untuk mengatasi konflik internal, maka aktor-aktor di luar negara penyedia jasa keamanan itupun menjadi salah satu pilihan utama. Seperti yang dicatat oleh Barry Yeoman dalam *Soldier of good Fortune*, hanya dalam waktu kurang dari sepuluh tahun saja terdapat lebih dari 90 perusahaan seperti itu tersebar di 110 negara.[[7]](#footnote-8)

Disisi lain, sebagai negara *superpower* satu-satunya, AS ingin memegang kendali untuk menjaga hegemoninya tetap ada, kebijakan melakukan privatisasi keamanan-pun dapat dilihat dari dua sisi, di dalam konteks domestik hal tersebut menjadi upayauntuk mengurangi besarnya beban anggaran militer,antisipasi risiko pengangguran dan potensi kriminalitas. Sementara pada konteks hubungan luar negeri, privatisasi militer tersebut juga seirama dengan basis filosofis politik luar negeri AS yang kapitalis liberalis dan intervensionis, termasuk mendukung gerakan AS sebagai *Global RoboCop*.[[8]](#footnote-9)Maka tidak heran AS dan sektor privat bergandengan untuk memperoleh *maximum profit* dan kekuasaan atas negara-negara di dunia sekalipun bentuk privatisasi militer banyak ditentang oleh banyak kalangan termasuk oleh orang-orang Amerika Serikat sendiri. Lihatlah bagaimana kolaborasi kapitalisme dengan kontribusinya pada perubahan sifat keamanan dari perusahaan-perusahaan militer seperti Vinnell Corporation, DynCorp, Academi, KBR, MPRI, AirScan, Xe Service (sebelumnya Blackwater) ataupun Triple Canopy yang ikut dalam penyusunan agenda keamanan yang lebih luas (perubahan *the origin of threats* dan *the nature of threats*)[[9]](#footnote-10) dengan terlibat dalam berbagai kerjasama keamanan dengan negara-negara di belahan dunia.

Menyoal Amerika dan Timur Tengah khususnya Arab Saudi, Barry Buzandalam bukunya *New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century* banyakmenganalisa pola baru pasca era perang, terutama relasi baru kekuatan Timur-Barat dan konsekuensinya terhadap negara Pinggiran.[[10]](#footnote-11) Menurutnya, kemenangan Kapitalisme Barat atas Dunia Kedua berimplikasi pada *outline* baru dimana dibeberapa dekade ke depan Timur Tengah sengaja dijadikan oposisi bagi Hegemoni Barat dan meniscayakan tindakan-tindakan militerisasi di Pinggiran berkaitan dengan ketahanan dan kebijakan keamanan energi. Buzan juga menyinggung pertanyaan bagi negara-negara di Pinggiran terkait mampukah keamanan mereka sendiri terjamin dari pengaruh pola-pola baru hubungan antara negara-negara besar. Kemungkinan yang bisa dipilih adalah bersekutu dengan kekuatan besar seperti AS dengan risiko “bagi hasil” akibat hubungan yang asimetris, bersikap netral, ataukah mengisolasi diri (namun bagi negara yang kaya akan sumber daya alam hal ini akan sulit dilakukan mengingat keadaan negara pinggiran yang secara kapabilitas di bidang teknologi tertinggal dari negara-negara maju akan menyulitkan eksplorasi dan ekspolitasi sumber alam yang ada).[[11]](#footnote-12)

Arab Saudi muncul sebagai negara pengekspor minyak terbesar di dunia dan posisinya di kawasan-pun terbilang strategis apalagi untuk AS sebagai negara industri yang membutuhkan bahan baku minyak untuk menggerakan industrinya menjadikan Arab Saudi memiliki nilai tawar amat dipertimbangkan. Bagi Saudi agenda keamanan diprioritaskan pada pengamankan produksi minyak, bahaya komunisme (saat perang dingin), *counter* pengaruh Iran, dan ancaman terorisme terutama Al-Qaeda. Relasi AS-Saudi telah lama dibangun, drama hubungan erat dapat diamati ketika menakar sejarah lahirnya ARAMCO – CASCO – CASOC yang dimulai sejak tahun 1933. Meskipun dalam prosesnya sempat mengalami tensi tinggi saat AS membantu Israel dalam perang Yom Kippur dan Raja Faizal merespon hal tersebut dengan melakukan embargo, namun setelah itu relasi kedua negara relatif stabil dan berkembang saat berakhirnya Perang Dingin sehingga banyak sekali pihak yang mengatakan ada hubungan khusus diantara kedua negara tersebut.[[12]](#footnote-13)

Kepentingan ekonomi bagi kedua negara akan selalu berkaitan dengan pengamanan stabilitas pengeksporan energi, AS membutuhkan itu untuk kepentingan industrialisasi-nya, begitupun Saudi menjual minyaksebagai sumber pendapatan terbesar negara dan juga keberlangsungan hidupnya. Hubungan ini semakin mesra ketika satu sama lain memiliki pemahaman yang sama terkait keberadaan terorisme terutama Al-Qaeda dan kesamaan kepentingan dalam membatasi pengaruh Iran di kawasan. Singkatnya, Keduanya menginginkan dominasi di Timur Tengah.

Bagi kerajaan Saudi, prioritas utama adalah pengamanan terhadap “*TheRoyal Family”* dari segala ancaman, baik yang datang dari internal maupun eksternal. Namun, meskipun dianugrahi dengan sumber minyak yang melimpah, dalam sektor keamanan seperti operasi intelijen dan penggunaan teknologi masih sukar untuk terlepas dari peran AS.

Kerajaan Saudi memiliki rentetan masalah yang bisa mengancam kekuasaannya yang berasal dari internal maupun tetangga-tetangganya, diantaranya: Keberadaan ekstrimis islam, terorisme, berkembang cepatnya eskalasi konflik antara Sunni dan Syiah yang erat kaitannya dengan perebutan kekuasaan geopolitik Timur Tengah antara Arab Saudi dan Iran, pergolakan yang terjadi di Yaman dan Mesir yang menghasilkan instabilitas regional, suara-suara reformasi dan demokrasi yang hendak didengungkan, pengaruh Iran di beberapa negara seperti Iraq, Lebannon dan Suriah, instabilitas isu sektarian di Bahrain dan Yaman, eksistensi *Moslem Brotherhood* (Ikhwatul Muslimin), ISIS di Iraq dan Suriah, Al-Qaeda di semenanjung arab, Jordan dan juga Qatar yang meskipun memiliki hubungan baik dengan AS tetapi mereka merupakan tantangan tersendiri bagi kerajaan Saudi.[[13]](#footnote-14)

Pandangan awas kerajaan Arab Saudi atas ancaman domestik dan kawasan ini menjadi alasan bagi kerajaan untuk menciptakan kebijakan ekstra ketat dalam keamanan nasional Kerajaan Saudi yang merupakan simbol negara. Hubungan baik yang telah dibina dengan AS sejak tahun 1933 dimanfaatkan Kerajaan Saudi dengan berinisiatif membuat pengamanan kerajaan diluar dari kementerian pertahanannya (*Ministry of Defense and Aviation*/ MODA), bekerjasama dengan Amerika Serikat melalui *program Manager—Saudi Arabian National Guard* (OPM-SANG) di tahun 1975, Vinnell Corporation memenangkan kontrak senilai 77 juta USD untuk melakukan modernisasi sistem dalam SANG (dalam bahasa Arab institusi ini bernama Al Haras Al Watani, kemudian menjadi Wuzarah Al Haras Al Watani As-Suudiyah setelah diresmikan menjadi sebuah kementrian, akan tetapi dalam tulisan seterusnya penulis akan memakai istilah SANG),[[14]](#footnote-15) termasuk melakukan pelatihan militer.[[15]](#footnote-16) Terciptanya SANG (Saudi Arabia National Guard) disebut-sebut sebagai penerus dari Ikhwan, tentara suku Raja Abdulaziz yang telah membantu King Abdulaziz menaklukkan Semenanjung Arab dari Ottoman Turki pada Perang Dunia Pertama hingga lahir Kerajaan Saudi Arabia yang memiliki kedaulatan sendiri.[[16]](#footnote-17) Bentuk pengamanan preventif ini cukup efektif membantu kerajaan terhadap kemungkinan ancaman kudeta militer yang beberapa waktu lalu melanda beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang banyak diistilahkan sebagai *Arab Spring*.

SANG dipercaya sebagai upaya kerajaan dalam menghadapi kemungkinan ancaman dari serangan militer dibawah kontrol Sudairi. Seiring dengan berkembangnya waktu, SANG menjadi lebih efektif dan menjanjikan sebagai pasukan bersenjata dibanding tentara reguler. Misi SANG diantaranya: (1) Menjaga keamanan dan stabilitas kerajaan. (2) Menjaga fasilitas-fasilitas vital (ladang minyak, situs-situs keagamaan) (3) Menjaga keamanan perbatasan (4) Menyediakan operasi keamanan dan pencegahan serangan internal terhadap kerajaan (5) Melayani pengamanan mahkota raja Abdullloh

SANG terlibat dalam membereskan bermunculannya Syiah di provinsi bagian timur, pengepungan Mesjid Besar di Mekah pada tahun 1979, dan berhasil menuntaskan kerusuhan yang diperbuat salah seorang warga Iran di Mekah pada 1987. Mereka juga membantu pengamanan Provinsi sebelah Timur selama perang Iran-Iraq dan Perang Teluk.[[17]](#footnote-18)

Tahun 1999 berdasarkan laporan dari IISS, SANG memiliki 57,000 tentara aktif dan 20,000 tentara suku, selang setahun, yakni tahun 2000 terjadi peningkatan sangat pesat menjadi 75,000 tentara aktif dan 25,000 dari suku.[[18]](#footnote-19) Dan di bulan februari tahun 2001 total kekuatannya menjadi 105,000. Menurut Anthony H. Cordesman*,* SANG telah berkembang, pola rekrutmennya tidak lagi hanya tebatas dari Suku-Suku Loyal Kerajaan, namun terbuka luas bahkan para penganut Syiah pun ikut terlibat.[[19]](#footnote-20) Kolaborasi dengan Vinnell Corporation, membuat SANG dianggap memiliki kapabilitas yang lebih baik daripada Tentara Reguler dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Kerajaaan Saudi.

Vinnell Corporationsendiri, muncul dengan segelumit permasalahan tentang statusnya dimata hukum internasional, diskursus sipil militer, sejarah keberadaannya maupun evolusi keamanan dalam model *­nation-state* yang secara umum diasumsikan oleh para pemikir Hubungan Internasional bahwa negara mengatur secara hirarkis dan menciptakan organisasi militer guna melakukan aktivitas-aktivitas keamanan sehingga pasukan militer pada hakekatnya haruslah menjadi bagian resmi negara sesuai dengan sifat negara yang memaksa, memonopoli maupun mencakup semua *(all encompassing, all embracing)*.[[20]](#footnote-21) Dalam konteks ini, Vinnell tidak bisa diklasifikasikan sebagai relawan perang yang disiapkan negara, karena Vinnell Corporation bukanlah militer resmi suatu negara, Vinnell hadir dengan *profit oriented* sebagaimana aktivitas bisnis pada umumnya.

Keberadaan segelintir teroris di Arab Saudi menunjukan ancaman langsung terhadap Kerajaan dan Vinnell Corporation sebagai *Private Military Company*yang berbasis di Amerika Serikat karena dipandang sebagai musuh utama para para penganut fundamentalis di Arab. Aksi teror-pun kerap dilakukan dengan sasaran yang mereka tidak sukai seperti terjadi pada saat peristiwa pengeboman sebuah mobil yang merenggut nyawa delapan orang pekerja Vinnell Corporation.[[21]](#footnote-22)

Jika dihitung-hitung, hingga tahun 2015,Vinnell telah menginjakan kaki selama 40 tahun semenjak program kerjasama pertama kali dilakukan pada 1973 kemudian program moderinsasi berjalan di tahun 1975. Ada banyak hal menarik yang bisa dibahas, beberapa di antaranya ialah:*Pertama*, awalnya program ini hanya bersifat jangka pendek atau berlaku selama lima tahun akan tetapi program terus berlanjut hingga karya tulis ini dibuat. *Kedua*, kerjasama ini sangat dekat dengan kesan tertutup, publik tidak mudah mendapatkan disklosur informasi terkait kejelasan kerjasama ini, literatur yang membahas tentang isu ini masih terbatas, disinyalir di Amerika Serikat bisnis ini merupakan bisnis tertutup dengan agenda tertentu antara militer, pengusaha dan negara. *Ketiga*, *Private Military Company*sering dipersepsikan sebagai *mercenaries* atau tentara bayaran yang penggunaannya menurut suatu konvensi PBB dilarang. Akibatnya muncul beragam penolakan terhadap keberadaan perusahaan macam Vinnell yang merupakan perusahaan penyedia jasa keamanan dan pertahanan. *Keempat,* ditinjau dari berbagai keterlibatannya di medan perang, Vinnell Corporation sering dikaitkan dengan CIA, maka banyak menganggap sebenarnya Vinnell merupakan bagian integral dari pemerintahan AS dan menjadi *proxy* politik luar negerinya.*Kelima,* dalam perjanjian kerjasama untuk modernisasi SANG, Vinnell ditugasi sebagai konsultan dan pelatih SANG, dengan kata lain Vinnell dalam 40 tahun terakhir ini memiliki peran dalam menentukan –misalnya– doktrin militer SANG dan pengalokasian anggaran SANG.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk menelitimasalah tersebut dengan judul **“Keterlibatan Private Military Company (Vinnell Corporation) dalam Kerjasama Militer Amerika Serikat-Arab Saudi untuk Modernisasi Pasukan Al Haras Al Watani As-Suudiiyah/ SANG (Saudi Arabia National Guard)”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengidentifikasikan masalah yang sedang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana awal mula munculnya *Private Military Company* secara umum dan sepak terjang Vinnell Corporation?
2. Bagaimana proses kerjasama antara Amerika Serikat dan Kerajaan Arab Saudi dalam modernisasi SANG?
3. Bagaimana analisis tentang keterlibatan Vinnell Corporation dalam pelaksanaan modernisasi SANG?
   1. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang dikemukakan,diperlukan pembatasan masalah dengan tujuan untuk memfokuskan penelitian terhadap masalah yang ditentukan agar tidak keluar dari topik pembahasan. Maka pembatasan masalah penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup keterlibatan Vinnell Corporation dalam kerjasama militer AS-Arab Saudi untuk modernisasi SANG hingga tahun 2015.

* 1. **Perumusan Masalah**

Guna memudahkan dalam menganalisa permasalahan diatas yang berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka diperlukan perumusan masalah yang menunjukkan: “Sejauh mana keterlibatan Vinnel Corporation dalam kerjasama militer Amerika Serikat dan Arab Saudi untuk modernisasi SANG?”

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
   1. **Tujuan Penelitian:**
2. Untuk mengetahui secara spesifikcakupan *Private military company*dan sepak terjang Vinnell Corporation
3. Untuk mengetahui proses dan pertimbangan diberlakukannya kerjasama Amerika Serikat dan Saudi dalam modernisasi SANG.
4. Untuk mengetahui keterlibatan Vinnell Corporation dalam memodernisasi SANG
   1. **Kegunaan Penelitian:**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Memberi gambaran guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran-gambaran bagaimana kesesuaian antara teori dan fakta.
2. Memberi wawasan tersendiri bagi rekan mahasiswa yang sedang atau mengadakan penelitian lebih lanjut untuk kepentingan penyusunan skripsi ataupun karya ilmiah lain.
3. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
   1. **Kerangka Teoritis**

Merujuk pendefinisiannya, menurut Mochtar Mas'oed Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional organisasi non-pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintahan domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku Internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.[[22]](#footnote-23)

Sementara menurut K.J Holsti:

**Hubungan internasional berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.**

Dalam disiplin keilmuan Hubungan Internasional, dikenal beberapa paradigma, seperti: Realisme[[23]](#footnote-24), Liberalisme[[24]](#footnote-25) ataupun Teori-teori Kritis.[[25]](#footnote-26) dalam karya tulis ini, penulis akan berfokus pada pendekatan Realisme.

Penulis dalam penelitian ini setidaknya melihat ada tiga aktor yang terlibat, (1) Amerika Serikat, (2) Arab Saudi, (3) *private sector* dalam hal ini *Private Military Company*: Vinnell Corporation. Artinya terdapat dua aktor negara (*state*) dan satu aktor bukan negara (*non state*). Ketiga aktor ini saling berketerkaitan dalam suatu kontrak kerjasama di bidang militer untuk pembaharuan dan pelatihan militer Arab Saudi. Aktor-aktor yang terlibat ini dikatakan aktor “rasional” yang setiap perilakunya –jika mengacu pada paradigma realisme– adalah untuk mempertahankan diri (*survival*)[[26]](#footnote-27) dari anarkisme tatanan internasional*.*Di dalam perspektif ini, Vinnell Corporation dilihat sebagai instrumen AS untuk memperoleh “*power*”, karena negara dianggap merupakan aktor yang paling dominan dalam praktik hubungan internasional. Penekanan terhadap diskursus *power*sebagai kajiananalisis sendiri senada dengan pemikiran Holsti yang beranggapan:

**apapun tujuan jangka panjang suatu negara, tujuan jangka pendeknya adalah kekuasaan terhadap negara lain. Politik internasional dirumuskan sebagai perjuangan kekuasaan antar negara, untuk ekspansi atau pertahanan dan perlindungan...difokuskan pada elemen-elemen kekuasaan negara, sebagian lagi pada teknik dan merode-metode yang digunakan oleh negara untuk memperbesar kekuasaannya. Karena model ini menganggap bahwa negara bisa berhasil karena mempunyai kekuasaan, maka pertimbangannya membutuhkan pertimbangan dan penafsiran berkepanjangan dalam menentukan posisi kekuatan (*power position*) tiap negara, yang meliputi letak geografis, sumber alam, populasi, tingkat tekologi kekuatan militer yang tersedia, dan kepribadian nasional.[[27]](#footnote-28)**

Kerjasama militer AS dan Arab Saudi terjalin melalui beberapa pertimbangan akan keberlangsungan dan keamanan kerajaan Arab Saudidari dinamika geopolitik sekaligus geoekonomi yang –rentan bergejolak–terjadi di Timur Tengah serta persepsi terhadap Amerika Serikat yang berstatus negara *superpower*.

Untuk menganalisa lebih mendalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas barangkali akan dijelaskan pada Bab-bab berikutnya. Namun, sebagai pijakan konseptual untuk memahami proses pembuatan keputusan politik luar negeri itu, teori *internal-eksternal setting* dari Snyder dapat membantu menjelaskan cara menganalisisnya: *pertama*, pahami siapa pembuat keputusan atau individu dalam unit yang memutuskan (*decisional units*); *kedua*, pahami bagaimana aktor-aktor kunci tersebut mengartikan keadaan atau kondisi sosio politik negaranya dan dunia internasional –dalam bahasa Synder disebut *definition of the situation*–*; ketiga*, setelah memperoleh gambaran umum, maka proses selanjutnya adalah pemilahan dan penghubungan obyek-obyek, kondisi-kondisi dan aktor-aktor lain yang dipersepsikan dapat membantu tercapainya keinginan *decision units* dalam konteks *relational*, setelah itu, diukur dalam pembuatan definisi dari tujuan yang diinginkan hingga terjadi penyempitan pilihan dan penerapan *standard of acceptability.[[28]](#footnote-29)*

Konsep yang hampir sama diterapkan oleh Sprout, yang membedakan hanya istilah *setting* diganti menjadi *milieu* namun artinya sama-sama lingkungan. Menurutnya, pertama pahami arah tujuan yang diorientasikan oleh pembuat keputusan; kedua, ketahui data yang biasanya diambil dalam menganalisis situasi dan; terakhir, cara menggunakan data untuk merumuskan strategi yang layak.[[29]](#footnote-30)

Dari konsep Sprout dan Snyder di atas, terdapat kata kunci untuk memahami proses terciptanya politik luar negeri suatu negara, yakni pentingnya melihat kondisi domestik (*inward looking*) dan kontestasi internasional (*outward looking*) yang keduanya tidak bisa dikesampingkan satu diantara yang lainnya. Holsti menguatkan pandangan ini:

**Jika kita melihat politik internasional melalui perspektif masing-masing negara daripada perspektif sistem dimana negara itu berada akan muncul pertanyan yang agak berbeda. Kita bisa berusaha untuk menjelaskan tingkah laku suatu negara, dengan tidak hanya mengacu pada lingkungan eksternal (sistem), tapi terutama mengacu pada keadaan domestik yang mempengaruhi pembuat kebijakan. Perang, aliansi, imperialisme, manuver-manuver diplomatik, isolasi, dan tujuan-tujuan kegiatan diplomatik, dapat dilihat sebagai akibat tekanan-tekanan politik domestik, ideologi nasional, pedapat umum, atau kebutuhan sosial ekonomi tertentu.[[30]](#footnote-31)**

Maka, jika tingkat analisis yang hendak di tarik adalah pada level negara seperti asumsi realisme, kemungkinan kemunculan *Private Military Company* dalam hal ini Vinnell Corporation merupakan hasil pertimbangan dalam negeri AS dalam hal ini –meminjam istilah dialektika Hegel– sintesis atas penghematan anggaran belanja militer AS yang besar dan pengurangan jumlah personil militer secara bertahap, bentuk nyatanya jika merujuk laporan dari David Coleman, terdapat penurunan personil militer AS yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 1945, jumlah personil militer aktif AS berjumlah lebih dari dua belas juta jiwa, bandingkan dengan data di tahun 2014, total pasukan militer AS hanya berada dikisaran 1,4 juta jiwa.[[31]](#footnote-32) Sementara dalam analisis *outward looking*-nya hendak berkaitan erat dengan kepentingan pengaruh dan dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah berhubungan dengan kondisi geopolitik dan geoekonomi kawasan tersebut.

Di pihak Arab Saudi, masalah-masalah sosial seperti kemiskinan atau-pun pengangguran memiliki dimensi ancaman yang sewaktu-waktu bisa mengganggu status quo kerajaan, disamping keberadaan segelintir kelompok fundamentalis yang beberapa kali menebar teror. Lebih lagi, politik istana antar keluarga kerajaan yang disinyalir bisa sewaktu-waktu mengambil alih kekuasaan.

Setelah keduanya merumuskan kepentingan nasionalnya masing-masing, berikutnya aktor-aktor tersebut akan memasuki skala yang lebih luas meliputi proses interaksi yang –dalam keilmuan Hubungan Internasional­– disebut sistem internasional. Menurut paradigma realisme, sifat dari sistem internasional ini adalah anarkis dikarenakan ketiadaan kedudukan tertinggi di atas negara. Holsti dalam hal ini menjelaskan sistem internasional dan beranggapan:

**Sistem internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan unit politik yang independen –suku bangsa, negara kota, bangsa atau kerajaan – yang berinteraksi dengan frekuensi yang tinggi dan menurut proses yang teratur[[32]](#footnote-33)...masalah internasional menjelaskan tingkah laku negara melalui: atribut dan kebutuhan nasional, atau karakteristik individual pembuat kebijaksanaan, lingkungan ekternal dan khususnya struktur kekuasaan serta pengaruhnya dalam sistem internasional yang dapat mempunyai efek besar terhadap berbagai orientasi umum atau tujuan suatu negara dalam hubungannya dengan dunia yang lain.[[33]](#footnote-34)**

Fokus kajian penelitian ini berikutnya adalah mengukur sejauh mana Vinnell Corporation yang dipandang sebagai instrumen Amerika Serikat dalam proses kerjasama yang dilakukan dengan pihak Arab Saudi. Bentuk kerjasama keamanan dan pertahanan ini mengasumsikan bahwa negara bisa saja bekerjasama dengan pihak luar selama langkah tersebut dapat memenuhi “kepentingan”-nya sebagaimana Holsti asumsikan:

**Negara yang berusaha untuk membangun suatu koalisi diplomatik atau aliansi militer permanen mengasumsikan bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan negara, membela kepentingan mereka, ataupun mencegah ancaman, dengan cara memobilisasi kapabilitas mereka sendiri. Jadi, mereka harus bersandar dan membuat komitmen pada negaralain yang juga menghadapi masalah eksternal serupa itu atu mempunyai tujuan yang serupa dengan mereka[[34]](#footnote-35)**

Memperkuat konsep dari Sprout dan Synder di atas, Holsti kembali menekankan setting internal dan eksternal sebagai keharusan dalam membuat keputusan:

**Suatu pemerintahan pada umumnya berusaha mewujudkan tujuan nasionalnya melalui berbagai cara yang bervariasi antara lain satu negara dengan yang lainnya, yang direfleksikan antara lain melui perumusan kebijakan politik luar negerinya. Karena itu tujuan politik luar negeri suatu negara harus bersifat spesifik dan tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan negara tersebut...[[35]](#footnote-36)**

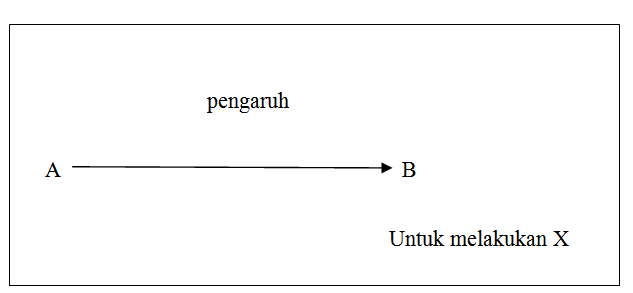
Penekanan dari paradigma realisme lain ialah melihat dunia sebagai ajang kompetisi. Kompetisi yang dimaksud bisa terejawantahkan dalam hal yang *high politics* atau politik keamanan maupun*low politics* yang berupa perebutan pengaruh ekonomi dan sosial. Selebihnya kembali mengutip asumsi Holsti:

**Berbagai orientasi, peranan dan tujuan terdiri dari sejumlah kesan yang terdapat dalam pikiran para pembuat kebijaksanaan, sikap mereka terhadap dunia luar, keputusan-keputusan dan aspirasi mereka. Tetapi kebijaksanaan juga memiliki komponen lain berupa seperangkat tindakan, yakni apa-apa yang dilakukan oleh suatu pemerintah terhadap pemerintah lainnya dalam rangka menjalankan sejumlah orientasi tertentu, memainkan beberapa peranan arau mencapai dan memperhankan tujuan-tujuannya. Pada dasarnya, suatu tindakan merupakan suatu bentuk komunikasi yang dimaksud untuk mengubah atau mempertahankan tingkah-laku pihak yang dikenai tindakan oleh pemerintah dan yang tergantung pada keberhasilan mencapai sasarannya.[[36]](#footnote-37)**

Seperangkat tindakan yang dimaksud diatas akan berhubungan dengan: (1) Kekuatan, (2) Kapabilitas dan (3) Pengaruh.[[37]](#footnote-38)

Dalam menjelaskan kekuatan, proses politik internasional bermula ketika suatu pemerintah –katakanlah pemerintah A– berusaha mengubah atau memperpanjang tingkah laku negara lainnya (misalnya: tindakannya, kesannya dan kebijaksanaannya) melalui berbagai tindakan atau isyarat:

**Tabel 1**

**Konsep Pengaruh**

Bagaimana pengaruh dijalankan: (1) *penetrasi*, berupa usulan terhadap suatu hal (2*) penawaran ganjaran* (3) *pemberian ganjaran*, pihak A menjanjikan sesuatu yang menyenangkan pada pihak B (4) *ancaman hukuman*: boikot, embargo (5) *penderitaan hukuman non kekerasan* (6) *kekuatan*: penggunaan kekuatan militer.[[38]](#footnote-39)

Pendek kata, apabila pengaruh dan kapabilitas AS lebih besar[[39]](#footnote-40), maka ilustrasinya akan seperti ini: Arab Saudi membutuhkan status quo tetap aman dan juga menginginkan dominasi kawasan (Timur Tengah). Amerika Serikat yang merupakan “karib baik” Arab Saudi melakukan penetrasi dan penawaran berupa iming-iming keamanan dengan alasan dapat membantu keamanan Arab Saudi hingga muncul kontrak kerjasama. Neoliberalisme kemudian berkontribusi untuk memberikan keuntungan lebih untuk Amerika Serikat, kontrak kerjasama militer dibuat, kemudian Vinnell dipilih sebagai pihak “lain” yang juga akan melatih militer Arab Saudi. Keuntungan lain yang diperoleh Amerika Serikat ialah menjaga keamanan minyak serta menjadikan Arab Saudi tameng melawan komunisme dan pengaruh Iran di kawasan. Kondisi diatas memunculkan kesan adanya dominasi Amerika Serikat terhadap Arab Saudi. Dominasi sendiri dijelaskan oleh Abubakar Eby Hara melalui teori stabilitas hegemonik sebagai sesuatu yang diidamkan oleh politik kekuasaan. Abubakar menuturkan:

**Dalam sistem hegemoni ini, ada satu negara yang dominan, sementara negara-negara besar lain mengikuti dan mau bekerjasama. Negara hegemonik memililki kapabilitas yang cukup sehingga berhasil menerapkan dan memaksa negara lain untuk mengukung aturan, norma dan lembaga yang dibuat oleh negara hegemonik ini... kapabilitas bertumpu pada kekuatan ekonomi yang berkembang dan besar, dominasi dalam kemajuan teknologi dan memiliki kekuatan politik yang didukung oleh kekuatan militer.**

Berdasarkan data di atas, ada dua konsep berbeda yang diterapkan oleh kedua negara. Dalam hal ini Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan memakai konsep realis ofensif dengan prinsip *power maximizers,* sementara Arab Saudi menerapkan konsep realis defensif dengan mengharapkan *security maximizers*. Dengan kata lain, Amerika Serikat datang dengan penguatan dominasi atas Arab Saudi (dan kawasan), sementara Arab Saudi “cenderung”mengikuti Amerika Serikat dan fokus pada penerapan pengamanan.[[40]](#footnote-41)

Seperti teori sosial pada umumnya, suatu teori Hubungan Internasional berasal dari refleksi suatu tokoh dalam melihat kondisi dunia (seperti sejarah, politik, perkembangan teknologi ataupun ekonomi) kemudian dari peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan seperangkat nilai. Di sisi lain,seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai macam peristiwa internasional yang terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut tak jarang melatarbelakangi perkembangan suatu disiplin akademis. Semisal, terjadinya perang dunia memunculkan dominasi perspektif realisme yang *melulu* fokus terhadap kajian keamanan: penguatan kapabilitas militer, kemudian di tahun-tahun 1970-an hingga kekinian, fokus kajian yang *high politics* tidak menjadi satu-satunya yang dominan, tema-tema terkait kerjasama antar negara menjadi agenda yang tak kalah penting. Hal tersebut, dikatakan oleh Jill Steans sangat erat hubungannya dengan interdependensi ekonomi global di bawah kepemimpinan ‘dominasi’ AS.

Dari perkembangan ini, muncul pendekatan neorealisme sebagai sub mahzab realisme klasik yang memadukan konsep politik kekuasaan dengan teori-teori ekonomi atau yang juga sering disebut sebagai konsep Ekonomi Politik Internasional.Lebih jelasnya Jill Stean menuturkan:

**Neorealisme menggabungkan beberapa ide kaum realis yang cukup tradisional mengenai kekuasaan dan sentralitas negara dalam hubungan internasional, dengan ide-ide kaum liberal tentang rasionalitas dan kerjasama ekonomi...kaum neorealis percaya bahwa negara-negara bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan, dan cara terbaik untuk meraihnya adalah dengan menjamin perekonomian internasional pasar bebas yang sangat liberal. Dengan berpura-pura memusatkan perhatian dalam memahami interkoneksi antara ekonomi dan politik, kaum neorealis terus mendekatkan penekanan neorealisme atas kepentingan diri sendiri....MNCs tidak dianggap sebagai aktor independen atau otonom dalam perekonomian internasional, tetapi lebih dilihat sebagai perpanjangan tangan negara atau alat kebijakan luar negeri. Keberadaan MNCs kemudian, tidak menjadi kekuatan yang signifikan secara ekonomidan politik menurut hak diri mereka sendiri, tetapi sebagai ukuran dan refleksi dari keuasaan dan –mungkin– dari negara-negara tertentu.[[41]](#footnote-42)**

Di pihak Arab Saudi, penulis melihat terdapat makna strategis dari kerjasama militer dalam memodernisasi pasukan SANG yang masih dilakukan hingga kini. Secara umum Arab Saudi sedang berupaya membangun sistem keamanan yang –menurut mereka– kuat sehingga mampu meminimalisir potensi ancaman yang ada. Ancaman bagi Arab Saudi bisa dipersepsikan beragam termasuk masalah sosial, akan tetapi penguatan postur SANG dalam hal ini menitikberatkan kepada persepsi ancaman geopolitik kawasan dan aksi-aksi subversif domestik yang bisa mengganggu status quo[[42]](#footnote-43) kerajaan seperti keberadaan segelintir kelompok teroris yang memiliki kepentingan berbeda dengan kerajaan. Untuk mengatasi ancaman tertentu dibuatlah serangkaian kebijakan keamanan.Pandangan realisme dalam Hubungan Internasional sendiri sangat erat kaitannya dengan konsepsi keamanan nasional yang merupakan prasyarat dasar untuk menjaga kelangsungan hidup suatu negara dengan mempergunakan instrumen ekonomi, diplomasi, kekuatan militer maupun politik.

Dalam pandangan Walter Lippmann, konsep keamanan (tradisional) dimaknai dengan penjelasan: “*a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challanged, to maintain them by victory in such a war.”[[43]](#footnote-44)*

Sementara Miriam Webster Dictionary menyebutkan:

**security: the quality of state of being secure as a) freedom from danger: safety; b) freedom from fear or anxiety; c) freedom from the prospect of being laid off, or something that secures: protection, measures taken to guard against espionage or sabotage, crime, attack or escape. When organization or department whose task is security.[[44]](#footnote-45)**

Sejauh ini, hasil dari kerjasama modernisasi SANG masih terbukti tangguh dalam menjaga stabilitas Arab Saudi, amat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Akan tetapi, jika dilihat lebih mendalam muncul beragam pertanyaan terkait sampai kapan kontrak terhadap modernisasi SANG termasuk pelatihan, penyusunan doktrin militer dan aspek-aspek lainnya berakhir, sebab muncul kesan bahwa sejak pertama kali tercetus di tahun 1970-an hingga kini, dengan kesan negatif dan ditutup-tutupi, program kerjasama untuk modernisasi SANG dianggap paradoks bagi keamanan Arab Saudi sendiri. Bagaimana tidak, kemunculan AS dan Vinnell dalam tubuh pasukan elit Arab Saudi sebagai pelatih, penyusun strategi, doktrin perang, hingga berhubungan dengan aspek-aspek penting bidang pertahanan Arab Saudi memungkinkan menjelma menjadi ancaman tersendiri bagi Arab Saudi. Konsepsi keamanan lain dari Harold Laswell mengungkapkan jika: *“the distinctive meaning of national security means freedom from foreign dictation.”[[45]](#footnote-46)* Artinya, sangat mungkin Amerika Serikat (beserta Vinnell) mampu mengarahkan keamanan dan pertahanan Arab Saudi. Dan mengacu pada pandangan Harold Laswell di atas, berarti Arab Saudi belum benar-benar ‘aman’ karena instrumen keamanannya sedang ‘diperbantukan’ pihak-pihak diluar kerajaan.

Dalam pembahasan lebih lanjut, diskursus mengenai penggunaan PMC baik dalam keterlibatannya secara aktif (terlibat langsung pada operasi perang) maupun pasif (perawatan ataupun pelatihan keamanan dan militer) seringkali diperdebatkan terutama dalam aspek legalitas. Ada golongan yang menganggap bahwa PMC merupakan kata lain dari mercenaries yang segala aktivitasnya tidak diperbolehkan jika mengacu pada konvensi PBB tentang tentara bayaran.[[46]](#footnote-47)Ada pula yang menyangka bahwa PMC berbeda dengan mercenaries. Seperti dilaporkan oleh juru bicara Amerika Serikat untuk PBB yang mengatakan bahwa: *“Accusations that U.S. government-contracted security guards, of whatever nationality, are mercenaries is inaccurate”[[47]](#footnote-48)* Ada juga yang menganggap jika PMC harus di atur lebih jelas agar ada kejelasan terutama dalam konteks hukum humaniter internasonal karena orang-orang yang terlibat didalamnya menimbulkan kebingungan secara hukum semisal apakah orang-orang dalam PMC dikatogorikan kombatan ataukah tidak.Akan tetapi asumsi-asumsi realisme barangkali menjawab jika AS tidak perlu meratifikasi dan setuju terkait penolakan penggunaan mercenaries dan juga PMC selama hal tersebut berkesesuaian dengan kepentingan nasionalnya. Dan memang benar jika pada prakteknya UN *Mercenaries Convention* tidak diratifikasi oleh AS.

Dalam posisi tersebut, kiranya penulis menekankan kembali asumsi jika AS ingin memanfaatkan keberadaan *gap of market security.* Dalam konteks kerjasama untuk modernisasi pasukan SANG, pola kerjasama ‘bercabang’ bersama Vinnell Corporation dimaksudkan untuk menjaga dominasi atas Arab Saudi sekaligus menjaga status quo dengan berada pada posisi strategis di dalam pasukan SANG sebagai pasukan elite yang menjaga keamanan sumber daya sekaligus fungsi pertahanan Arab Saudi.

* 1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“jika keterlibatan Vinnell dalam kerjasama militer AS-Arab Saudi untuk modernisasi SANG merupakan strategi AS untuk menjaga dominasi dan upaya memperhemat anggaran militer AS, dan Arab Saudi memakai Vinnell dalam modernisasi SANG untuk menjaga status quo, maka Amerika Serikat memiliki pengaruh dalam mengarahkan status quo dan kebijakan keamanan Arab Saudi”**

* 1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Untuk membantu menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penullis membuat definisi operasional Variabel tentang konsep hipotesis diatas, yaitu:

**Tabel 2**

**Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel (konsep teoritik) | Indikator (empirik) | Verifikasi (analisis) |
| **jika keterlibatan vinnell corporation dalam kerjasama militer AS-Arab Saudi untuk modernisasi SANG merupakan strategi AS untuk menjaga dominasi dan upaya memperhemat anggaran militer AS, dan Arab Saudi memakai Vinnell dalam modernisasi SANG untuk menjaga status quo** | 1. Adanya pengurangan jumlah militer reguler di Amerika Serikat 2. adanya aturan-aturan legalisasi *Private Military Company* 3. adanya keterlibatan SANG dalam beberapa pertempuranseperti Kudeta Mekkah, perang teluk, Khafji, mengatasi demonstran di Bahrain, pertempuran melawan Houthi di Yaman | 1. Data (fakta dan angka) mengenai pengurangan personil militer di AS 2. Data dan fakta legislasi tentang PMC di AS 3. Data dan fakta keterlibatan SANG dalam beberapa permepuran |
| Variabel Terikat:  **maka Amerika Serikat memiliki pengaruh dalam mengarahkan status quo dan kebijakan keamanan Arab Saudi”** | 1. Vinnell menjadi pelatih dan konsultan perang pasukan SANG 2. Pembelian senjata perang untuk pasukan SANG diatur oleh Vinnell | 1. Data dan fakta keterlibatan vinnell dalam melatih dan menjadi konsultan pasukan SANG 2. Data dan fakta mengenai mengenai pembelian senjata perang untuk pasukan SANG ditur oleh Vnnell. |

* 1. **Skema KerangkaTeoritis**

**Tabel 3**

**Skema Kerangka Teoritis**

1. **Tingkat Analisis, Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
   1. **Tingkat Analisis**

Berdasarkan hal diatas, penulis menggunakan individu/kelompok sebagai unit analisanya dan unit eksplanasinya menggunakan negara-bangsa. Hubungan diantaranya melahirkan tingkat analisa reduksionis.

* 1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. **Metode Penelitian Deskriptif**

Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang,dalam metide deskriptif dipelajari kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang seddang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomiena. Dengan metode ini dapat diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lain. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotersa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

1. **Metode Penelitian Historis**

Metode penelitian historis adalah usaha untuk memberikan interpretasi dari *trend* yang naik turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan keadaan sekarang dan dapat meramalkan kedaan yang akan datang serta merupakan metode penyelidikan yang kritisterhadap keadaan-keadaan, perkembangan-perkembangan, pengalaman dimasa lalu, yang masih ada kaitannya danmempunyai hubungan yang berkesianmbungan berdasarkan sumber data sekunder

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yakni langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis memakai dua teknik dalam pengumpulan data, antara lain: teknik studi kepustakaan/ literatur (*library research*) dengan cara melakukan penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non pemeritah maupun data-data yang terdapat di internet dan teknik wawancara dengan melakukan perbincangan dengan para pakar atau profesional yang dianggap ahli dalam bidang masalah yang sedang diteliti.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
   1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan mengambil lokasi di beberapa perpustakaan atau instansi yang dianggap relevan dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai bahasan yang diteliti: lokasi tersebut antara lain:

1. **Kementerian Luar Negeri RI,**

Jln. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat

1. **Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan**

Jln. Lengkong Besar No. 68, Bandung

1. **CSIS**

Jalan Tanah Abang III, No. 23-27, Jakarta - 10160

1. **Embassy of Saudi Arabia**

Jl. MT Haryono Kav 27, Cawang Atas Jakarta 13330

1. **Perpustakaan Museum KAA**

jalan Asia Afrika No.65 Bandung 40111 Indonesia

* 1. **Lama Penelitian**

Penelitian diprogramkan 6 bulan, sejak Desember 2014 hingga April 2015. Dimulai dari persiapan judul, proposal penelitian, hingga pencarian dan pengolahan data.

1. **Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan pedoman teknis penyusunan skripsi FISIP unpas, penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang antara satu bab dengan bab lain memiliki keterkaitan untuk menciptakan suatu karyai lmiah yang runut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I**, memuat tentang pendahuluan, berisikan sub-sub yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,, kerangka teoritis, metode penelitian, lokasi dan tabel lama penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

**BAB II**, menguraikan definisi-definisi PMC dan uraian-uraian lebih lanjut mengenai kiprah Vinnell Corporation

**BAB III**, membahas mengenai informasi umum tentang Arab Saudi dan Amerika serta kerjasama militer untuk modernisasi SANG

**BAB IV**, menganalisis keterlibatan Vinnell Corporation dalam menjaga keamanan Arab Saudi. Bab ini merupakan jawaban atas hipotesis dari indikator-indikator penelitian, baik variabel bebas ataupun terikat.

**BAB V,** berisi penutup yang merupakan kesimpulan penulis dalam karya tulis

1. Suatu periode terjadinya ketegangan [politik](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik) dan [militer](http://id.wikipedia.org/wiki/Militer) antara [Dunia Barat](http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Barat), yang dipimpin oleh [Amerika Serikat](http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat)dan sekutu [NATO](http://id.wikipedia.org/wiki/NATO)-nya, dengan [Dunia Komunis](http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Kedua), yang dipimpin oleh [Uni Soviet](http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviet)beserta sekutu negara-[negara satelitnya](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_satelit). Peristiwa ini dimulai setelah keberhasilan [Sekutu](http://id.wikipedia.org/wiki/Sekutu_Perang_Dunia_II) dalam mengalahkan[Jerman Nazi](http://id.wikipedia.org/wiki/Jerman_Nazi)di [Perang Dunia II](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II), yang kemudian menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua [negara adidaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_adidaya) di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Setelah Michael Gorbachev memperkenalkan kebijakan *Glasnost (*1985) dan *Perestroika* (1987),Soviet dan negara-negara satelitnya dilanda [gelombang revolusi](http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_1989) damai yang berakhir dengan [runtuhnya Uni Soviet](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembubaran_Uni_Soviet)pada tahun 1991.

   [http://id.wikipedia.org/wiki/Politik. Diakses pada 17](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik.%20%20Diakses%20pada%2017) Desember 2014 [↑](#footnote-ref-2)
2. Dalam situs dictionary.reference.com, *Superpower* didefinisikan sebagai *an extremely powerful nation, especially one capable of influencing international events and the acts and policies of less powerful nations*. Diakses 17 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-3)
3. # Sean M. Lynn-Jones,Steven E. Miller*, America's Strategy in a Changing World: An International Security Reader* (Cambridge: MIT Press, 1993), halaman v.

   [↑](#footnote-ref-4)
4. Blokade Berlin (1948–1949), Perang Korea (1950–1953), Krisis Suez (1956), Krisis Berlin 1961, Krisis Rudal Kuba (1962), Perang Vietnam (1959–1975), Perang Yom Kippur (1973), Perang Afganistan (1979–1989), penembakan [Korean Air Penerbangan 007](http://id.wikipedia.org/wiki/Korean_Air_Penerbangan_007).  [↑](#footnote-ref-5)
5. Dengan itu, penggunaan istilah Dunia Pertama, Kedua dan Ketiga menurut Buzan usang dipakai, menurutnya dengan tidak adanya Dunia Kedua, bagaimana bisa kita menjelaskan Dunia Ketiga ada, sementara Dunia Kedua telah hancur? Sehingga menurutnya untuk menjelaskan dunia Pasca Perang Dingin istilah yang dipakai adalah *centre-periphery*, *Centre* menandakan negara-negara kapitalis yang mampu mendominasi dan mempengaruhi perekonomian global sedangkan *Periphery* adalah negara yang secara politik, industri dan finansial lebih lemah dan tidak bisa terlepas dari negara *“centre”* [↑](#footnote-ref-6)
6. Hal itu pun secara khusus meniscayakan adanya corak perkembangan Hubungan Internasional baik dari aspek praktis (*bipolar – multipolar, high politics – low politics*) dan juga akademis (dalam hal ini politik internasional – Ekonomi Politik Internasional, Geo-politik – Geo-ekonomi, *State Centric World – Multi Centric World*). AS cukup leluasa dalam melakukan transformasi Ekonomi Politik Internasional dengan sistem kapitalisme pasar neoliberal menyumbang evolusi penting terhadap evolusi keamanan dan kemunculan *Private military company* terkait dengan bisnis perang dan perdagangan tentara bayaran. [↑](#footnote-ref-7)
7. Kusnanto Anggodo dalam Veronika Sintha Saraswati, *Imperium Perang Swasta* (Magelang: Resist Book, 2009) hal.xxv [↑](#footnote-ref-8)
8. <https://www.globalpolicy.org/nations-a-states/private-military-a-security-companies/pmscs-and-the-un.html> diakses pada 03 januari 2015. Meskipun banyak kecaman dari banyak pihak akan hadirnya *Private military company*, AS seolah tutup mata dan telinga ketika tidak ikut bagian sebagai *signatories* dalam UN mercenary convention. [↑](#footnote-ref-9)
9. Anak Agung Banyu perwita & Yanyan M Yani, *Pengantar Hubungan* Internasional (Bandung: Rosda, 2005) Hal 124. The *origin of threats* bila pada masa perang dingin ancaman-ancaman yang dihadapi selalu datang dari pihak luar/eksternal sebuah negara, maka pasca perang dingin ancaman-ancaman dapat berasal dari domestik dan global. Dalam hal ini ancaman yang beerasal dari isu-isu primordial seperti etnis, budaya dan agama. Sementara *The Nature of Threats* semula menyoroti ancaman-ancaman yang bersifat militer, namun seiring perkembangan nasional dan internasional mengubah sifat ancaman menjadi lebih rumit [↑](#footnote-ref-10)
10. Negara pinggiran istilah lainnya *periphery* digunakan untuk menklasifikasikan negara-negara dengan kekuatan relatif “lemah” seperti Amerika Latin dan Eropa Timur pada saat itu. Istilah yang dipakai Immanuel Wallerstein yang membagi dua jenis negara yakni inti (*core*) dan pinggiran (*periphery*). [↑](#footnote-ref-11)
11. Barry Buzan, *New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century (*International Affairs - Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 3(Jul., 1991) ) hal. 433 [↑](#footnote-ref-12)
12. <http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia%E2%80%93United_States_relations#Foundation_of_ARAMCO> diakses 3 januari 2015 [↑](#footnote-ref-13)
13. <http://csis.org/publication/need-new-realism-us-saudi-alliance> diakses pada 3 januari 2015 [↑](#footnote-ref-14)
14. Colonel Bandar O. Nahil Al Harbi, *SaudiArabia National Guard* (Pennsylvania: USAWC Class: 1991) Secara konseptual SANG juga dilibatkan dalam program-program pendidikan, kesehatan, kontruksi, dan event-event kultural. [↑](#footnote-ref-15)
15. Christopher M. Blanchard, “Saudi Arabia: Background and US relations” (Congressian Research Service, 2010) Saat itu Amerika Serikat sedang mengalami kerugian besar akibat kalah di Perang Vietnam 1971-1974 dan Vinnell sebelum mendapatkan kontrak dari Saudi tengah menderita kebangkrutan atas hal itu. [↑](#footnote-ref-16)
16. <http://www.aawsat.net/2006/09/article55265322> diakses pada 20 januari 2015 [↑](#footnote-ref-17)
17. *ibid* [↑](#footnote-ref-18)
18. IISS, The Military Balance, 1999-2000, London, Oxford, 1999, “Saudi Arabia,” The Military Balance, 2000-2001, 2001-2002 [↑](#footnote-ref-19)
19. Antony H. Cordesman, “Saudi Arabia Enters the 21st Century: The Military and Internal Dimension” dalam *CSIS* (Oktober 2002) [↑](#footnote-ref-20)
20. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama hal 50 [↑](#footnote-ref-21)
21. <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=acbj9fcbq7l8> diakses 11 februari 2015 [↑](#footnote-ref-22)
22. Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi.* (Jakarta: LP3ES, 1994) Hal. 28 [↑](#footnote-ref-23)
23. Jill Steans & Lloyd Pettiford: *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20009) hal 41-89. Dalam paradigma realisme, manusia pada hakikatnya dianggap *selfish* atau egois. Dasar tersebut yang sering membuat terciptanya konflik. Fokus paradigma ini secara umum meliputi kajian tentang perang, keamanan, politik kekuasaan, kepentingan nasional ataupun kedaulatan suatu negara. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.* Hal 93 – 146

    Liberalisme sebagai’isme’, paham atau teori yang luas mencakup teori politik, ekonomi, sosial, ataupun filsafat. Dalam Hubungan Internasional, Liberalisme merupakan sitesis dari masa perang yang mengedepankan masalah legalitas, otonomi moral, demokrasi, HAM. Lihat: LBB, PBB, World Bank ataupun IMF sebagai contohnya. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid hal 209-256. Teori Kritis, Secara umum teori ini mempunyai akar intelektual pada Marxisme. [↑](#footnote-ref-26)
26. Dunne, T., & Schmidt, *the globalization of world politics: an introduction to international politics* (Oxford: Oxford University, 2011) hal. 155

    Ada tiga asumsi utama realisme, yakni: *statism, survival* dan *self help*. *Statism* menjelaskan negara sebagai aktor utama, *survival* menggambarkan tujuan negara dan pengamanan atas ancaman yang berasal dari luar, *self help* digambarkan bahwa negara harus egois tidak boleh mempercayai negara lain, maka dari itu kekuatan militer harus kuat. [↑](#footnote-ref-27)
27. K. J holsti, *Politik Internasional: kerangka analisis* (Bandung: Bina Cipta, 1987 ) halaman 21 [↑](#footnote-ref-28)
28. Abubakar Eby Hara, *Pengantar Analisis Politik Luar negeri : Dari Realisme sampai Konstruktivisme* (Bandung: Nuansa, 2011) hal. 85 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*, hal 84 [↑](#footnote-ref-30)
30. K. J Holsti, *Op.Cit* hal 23 [↑](#footnote-ref-31)
31. David Coleman, US military personel: 1954-2014 http://historyinpieces.com/research/us-military-personnel-1954-2014 [↑](#footnote-ref-32)
32. Jay S Goodman,, *The Concept of System in International Relations Theory*, Background, 8 (1964) hal 257 [↑](#footnote-ref-33)
33. K. J Holst *Op. Cit* hal 39 [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*. Hal. 150 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.,* hal. 175 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid.,* hal. 205 [↑](#footnote-ref-37)
37. Menurut Morghentau kondisi seperti ini sangatlah ilmiah, dia memandang manusia terlahir untuk mengejar kekuasaan di atas yang lain. Pandangan ini dikenal dengan istilah *animus dominandi*. [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid.,* hal. 206-225 [↑](#footnote-ref-39)
39. Hal di atas tentu tidak boleh mengesampingkan analisis mengenai perbedaan distribusi kapabilitas antara aktor-aktor yang terlibat. Meminjam para pemikir neorealis, kerjasama militer dalam penilitian ini merupakan buah hasil struktur sistem internasional yang dibentuk dan ditentukan oleh negara yang memiliki kapabilitas militer dan potensi kekuatan lainnya tang kuat. [↑](#footnote-ref-40)
40. Dunne, T., & Schmidt, *Op Cit.,*  hal 151 [↑](#footnote-ref-41)
41. Jill Stean, *Op.Cit.,* hal 75-76 [↑](#footnote-ref-42)
42. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Status quo merupakan keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya, jadi mempertahankan status quo berarti memertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya [↑](#footnote-ref-43)
43. John Baylis danb Steve Smith, *The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations* (UK: Oxford Uniersity Press, 2001) Hal. 255 [↑](#footnote-ref-44)
44. Riant Nugroho, *National Security: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hal. 15 [↑](#footnote-ref-45)
45. Ibid hal. 16 [↑](#footnote-ref-46)
46. *The United Nation Mercenary Convention: the internastional convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*. Konvensi ini telah diratifikasi sebanyak 33 negara. Akan tetapi negara-negara dengan kekuatan militer besar tidak meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Amerika Serikat. [↑](#footnote-ref-47)
47. Higgins Alexander G.[US rejects UN mercenary report](http://www.usatoday.com/news/world/2007-10-17-3392316246_x.htm) [USA Today](https://en.wikipedia.org/wiki/USA_Today) http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2007-10-17-3392316246\_x.htm [↑](#footnote-ref-48)